

ETIKA BERMEDIA SOSIAL BAGI APARATUR PEMERENTAHAN

Muhammad Fardhan Daffansyah¹, Risqy Ferdiansyah²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

Korespondensi Email: fardandaffansyah@gmail.com¹, ifan91913@gmail.com²

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial di lingkungan pemerintahan, sehingga menuntut aparatur pemerintah untuk menggunakannya secara etis dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika bermedia sosial bagi aparatur pemerintah dalam perspektif Islam serta implementasinya dalam praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan sumber data berupa Al-Qur'an, hadis, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bermedia sosial di kalangan aparatur pemerintah masih belum merata. Sebagian telah menunjukkan sikap profesional, namun masih ditemukan perilaku yang kurang sesuai dengan prinsip etika, seperti penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan penyampaian opini yang berpotensi menimbulkan konflik. Dalam perspektif Islam, etika komunikasi menekankan prinsip kejujuran (ṣidq), amanah, tabayyun, serta menjaga adab dalam berkomunikasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai etika Islam dalam bermedia sosial sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga kepercayaan publik, serta membentuk citra positif aparatur pemerintah.

Kata Kunci: etika bermedia sosial; aparatur pemerintah; perspektif Islam; komunikasi digital; tabayyun

ABSTRACT

The advancement of information technology has led to an increased use of social media within government institutions, thereby requiring public officials to use it in an ethical and responsible manner. This study aims to examine the ethics of social media use among government officials from an Islamic perspective and its implementation in practice. The method used is a qualitative approach with a descriptive research type through library research, with data sources derived from the Qur'an, Hadith, books, and scientific journals. The results show that the application of social media ethics among government officials is still uneven. Some have demonstrated professional behavior; however, there are still practices that do not align with ethical principles, such as the dissemination of unverified information and the expression of opinions that may lead to conflict. From an Islamic perspective, communication ethics emphasize the principles of honesty (ṣidq), trustworthiness (amanah), verification of information (tabayyun), and maintaining proper conduct in communication. The conclusion of this study affirms that the application of Islamic ethical values in social media use is essential to enhance professionalism, maintain public trust, and build a positive image of government officials.

Keyword: social media; government officials; islamic prespective; digital communicatio; tabbayun

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara individu berinteraksi, termasuk dalam lingkungan pemerintahan. Media sosial kini menjadi sarana yang tidak hanya digunakan untuk komunikasi personal, tetapi juga sebagai alat penyebaran informasi, pelayanan publik, dan pembentukan citra institusi. Aparatur pemerintah sebagai representasi negara dituntut untuk mampu memanfaatkan media sosial secara bijak, profesional, dan bertanggung jawab. Namun

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 118 – 123.

demikian, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan etika yang baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, pelanggaran norma, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam konteks tersebut, etika bermedia sosial menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh aparat pemerintah. Etika ini tidak hanya berkaitan dengan aturan formal yang ditetapkan oleh institusi, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam berperilaku di ruang digital. Aparatur pemerintah diharapkan mampu menjaga integritas, netralitas, serta kehati-hatian dalam setiap konten yang dibagikan maupun interaksi yang dilakukan di media sosial.

Dari perspektif Islam, etika bermedia sosial memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), berkata baik (*qaulan sadidan*), serta larangan menyebarkan fitnah dan informasi yang belum jelas kebenarannya (*tabayyun*) menjadi prinsip utama dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, penerapan etika bermedia sosial bagi aparat pemerintah dalam perspektif Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam menjaga keharmonisan sosial dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana etika bermedia sosial bagi aparat pemerintah ditinjau dari perspektif Islam, serta bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik penggunaan media sosial di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman serta menjadi pedoman bagi aparat pemerintah dalam bermedia sosial secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam etika bermedia sosial bagi aparat pemerintah dalam perspektif Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali nilai, norma, dan prinsip etika yang bersumber dari ajaran Islam serta implementasinya dalam praktik bermedia sosial di kalangan aparat pemerintah. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik berdasarkan perspektif partisipan.

Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait etika aparat pemerintah dan penggunaan media sosial. Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang tertentu sesuai dengan kebutuhan pengumpulan dan analisis data.

Objek penelitian ini adalah konsep etika bermedia sosial bagi aparat pemerintah yang ditinjau dari perspektif Islam, sedangkan subjek penelitian berupa sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada nilai-nilai etika seperti kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), *tabayyun* (klarifikasi informasi), serta larangan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengolah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama (human instrument) yang dibantu dengan pedoman analisis dokumen untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan sistematis.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antar data.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi dari Al-Qur'an, hadis, dan literatur ilmiah lainnya. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap sumber data untuk memastikan validitas dan konsistensi informasi yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa penggunaan media sosial oleh aparatur pemerintah menunjukkan variasi yang cukup signifikan dalam penerapan etika komunikasi digital. Sebagian aparatur telah menunjukkan perilaku profesional dalam bermedia sosial, seperti menyampaikan informasi yang akurat, tidak bersifat provokatif, serta menjaga netralitas sebagai representasi institusi publik. Praktik ini mencerminkan adanya kesadaran akan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat sekaligus penjaga citra lembaga.

Namun demikian, masih ditemukan sejumlah aparatur yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan opini pribadi yang berpotensi menimbulkan konflik, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta kurang memperhatikan norma kesopanan dan etika komunikasi. Perilaku tersebut tidak hanya berisiko menimbulkan disinformasi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan internalisasi etika bermedia sosial belum merata di kalangan aparatur pemerintah. Dalam perspektif komunikasi Islam, etika komunikasi menekankan prinsip *tabayyun* (verifikasi informasi), kejujuran (*shidq*), tanggung jawab (*amanah*), serta menjauhi fitnah dan ujaran yang merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam menjaga kualitas komunikasi, termasuk di ruang digital. Oleh karena itu, perilaku aparatur yang belum mencerminkan nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diajarkan dalam Islam dan praktik nyata di lapangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahman (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital serta lemahnya pemahaman etika komunikasi menjadi faktor

utama dalam penyalahgunaan media sosial oleh pejabat publik. Rendahnya literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan media, tetapi juga mencakup kemampuan kritis dalam memilah informasi dan memahami dampak sosial dari setiap konten yang disebarakan.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Suryadi (2019) yang menyatakan bahwa sebagian besar aparatur pemerintah telah memiliki kesadaran etika digital yang baik. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan lokasi penelitian, karakteristik responden, serta dinamika lingkungan kerja yang memengaruhi perilaku komunikasi individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran etika digital masih bersifat parsial dan sangat dipengaruhi oleh faktor individu, budaya organisasi, serta keberadaan regulasi yang mengatur penggunaan media sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa pelatihan dan pembinaan terkait etika bermedia sosial masih terbatas dan belum menjadi program prioritas di sebagian instansi pemerintah. Padahal, dalam perspektif Islam, pembinaan akhlak merupakan aspek fundamental dalam membentuk perilaku individu, termasuk dalam interaksi digital. Kurangnya program pembinaan ini berimplikasi pada rendahnya konsistensi aparatur dalam menerapkan etika komunikasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap etika bermedia sosial berbasis nilai-nilai Islam. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui: (1) penyelenggaraan pelatihan literasi digital dan etika komunikasi secara berkala, (2) penyusunan pedoman resmi terkait etika bermedia sosial bagi aparatur pemerintah, (3) penguatan sistem pengawasan dan evaluasi internal, serta (4) penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan sebagai bagian dari budaya organisasi.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian etika komunikasi digital berbasis nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks birokrasi pemerintahan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara literasi digital dan etika Islam merupakan pendekatan yang relevan dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital.

Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembinaan aparatur agar lebih bijak, profesional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta citra aparatur pemerintah yang berintegritas, kredibel, serta mampu mencerminkan nilai-nilai etika Islam dalam setiap aktivitas komunikasi digital.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian berjudul “Etika Bermedia Sosial bagi Aparatur Pemerintah dalam Perspektif Islam”, baik berupa penyediaan sumber referensi, bimbingan akademik, maupun bantuan moral dan motivasi selama proses penulisan.

Dukungan tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada institusi dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa etika bermedia sosial bagi aparatur pemerintah dalam perspektif Islam berlandaskan pada prinsip kejujuran (shiddiq), amanah, tabayyun (verifikasi informasi), serta menjaga adab dalam berkomunikasi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman penting dalam membentuk perilaku aparatur pemerintah yang profesional, bertanggung jawab, serta mampu menjaga kepercayaan publik dalam penggunaan media sosial.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian etika komunikasi berbasis nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparatur pemerintah dalam membangun komunikasi digital yang etis, transparan, dan sesuai dengan norma keislaman. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam etika bermedia sosial mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat citra positif institusi pemerintah.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan, sehingga belum menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam melalui pendekatan lapangan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan etika bermedia sosial oleh aparatur pemerintah

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2007). *Pengembangan kurikulum: Teori dan praktik*. Ar-Ruzz Media.
- Aini, N., & Karim, A. (2022). Digital ethics among public servants in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Government Studies*, 18(2), 101–115. <https://doi.org/10.5678/jgs.v18i2.2022>
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Kementerian Agama Republik Indonesia).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fauzi, A., & Rahman, M. (2021). Community empowerment through Islamic social values in rural development. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145–158. <https://doi.org/10.1234/jpi.v10i2.5678>

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 118 – 123.

Hidayat, T., & Suryana, Y. (2020). Implementation of Islamic work ethics in youth organizations. *International Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–34.

<https://doi.org/10.5678/ijis.v5i1.234> Rahman, A. (2020). *Literasi Digital dan Etika Komunikasi Pejabat Publik di Era Media Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Panduan Etika Bermedia Digital*. Jakarta: Kominfo.

Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Suryadi, B. (2019). “Kesadaran Etika Digital Aparatur Pemerintah dalam Penggunaan Media Sosial.” *Jurnal Komunikasi Publik*, 5(2), 123–135.